**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CESSIE UNTUK PENGAJUAN KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DENGAN 1
(SATU) KREDITOR (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NOMOR 63/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST. DAN PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA NOMOR 09/PAILIT/
2013/PN.NIAGA.MDN.)**

Oleh: Novalia Simamora

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., MH

Alamat: Jalan Bandung, Harapan Raya, Pekanbaru

Email: novaliasimamora20@yahoo.com - Telepon : 082392072414

ABSTRACT

PKPU decision No. 63/ PKPU / 2012 / PN.Niaga.Jkt.Pst, the judge in its verdict acknowledges that the transfer of receivables (cessie) made by PT.Global (the applicant) to Johannes H.L.Thomas, although not preceded by civil events. Decision No. 09 / Bankrupt / 2013 / PN.Niaga.Mdn, rejected the petition for bankruptcy filed by the petitioner because the judge believes that the Cessie done by PT.TUM (the applicant) to Maswadi Yanto Ndey is considered invalid because it was not preceded by civil events prior to the transition accounts receivable (cessie).

The purpose of this research is first, to know whether to file Bankruptcy and Suspension of Payment Obligation (PKPU) with 1 (one) creditor. Second, how to obtain other creditors by using available legal institutions and tools and lastly to see if the cessie has the legal power to get other creditors.

This research uses the method used is normative juridical. This research method is done by examining the existing library material that is more discussed about legal systematics. The data used is secondary data, that is data supporting the information or supporting the completeness of primary data obtained from library conducted by literature study or literature. Data collection techniques that will be used in this research is by way of library research and data analysis is done qualitatively normative ie the analysis used without the use of numbers and statistics and mathematical formulation is presented in the form of description.

The results of this research are first, based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The creditor can not apply for Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation because it does not meet one of the requirements that the debtor has only 1 creditor only. Secondly, Cessie is a method of transferring and / or handling of receivables in the name set forth in Article 613 of the Civil Code (KUH Perdata). The transition of receivables by means of this cessie that can be used as a creditor to get other creditors. Third, the government should make more specific and detailed legal rules on the transfer of receivables in a cessie manner so that law enforcement authorities can consistently apply the rule of law for the sake of justice for the parties concerned in PKPU.

Keywords: Cessie-Bankruptcy-Legal Certainty

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan uang sebagai alat tukar yang selalu digunakan untuk bertransaksi, baik untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, termasuk dalam hal berbisnis. Sebelum orang mengenal uang sebagai alat tukar, seseorang akan melakukan barter antara satu dengan yang lainnya yaitu dengan menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diperlukannya dari orang lain.¹

Orang perorangan (natural person) maupun suatu badan hukum (legal entity) adakalanya tidak mempunyai uang yang cukup untuk membiayai kegiatan atau keperluannya, agar dapat mencukupi kekurangan uang tersebut orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan kepada pihak lain.² Utang piutang tersebut timbul karena adanya para pihak yang menyepakati suatu perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan diantara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya

sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya, dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya.⁴ Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.

Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya debitor banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara yang sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Cara yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu para pihak dapat melakukan percobaan perdamaian melalui perundingan ataupun cara lain yang disepakati. Cara yang sesuai dengan hukum, para pihak dapat menyelesaikannya melalui melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan, dan juga dapat melakukan pengajuan permohonan pailit ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.⁵

¹ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 2.

² Ibid.

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁴ H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1.

⁵ Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 24.

Aturan yang mengatur tentang kepailitan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang selanjutnya disebut sebagai UUK dan PKPU. Dalam UUK dan PKPU tersebut, selain mengatur tentang permohonan pailit, juga mengatur tentang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU diatur dalam BAB III, yaitu mulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK dan PKPU

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditur maupun bagi debitur dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.⁶

Bila dalam mengajukan permohonan pailit atau PKPU tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUK dan PKPU yaitu debitur harus memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditor atau lebih atau dengan kata lain hanya memiliki 1 (satu) kreditor, maka pengajuan permohonan pailit dan PKPU tersebut tidak dapat diterima. Permohonan tersebut ditolak karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU.

Cessie adalah suatu pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditor lama dengan calon kreditor baru. Dalam cessie utang piutang lama tidak hapus, hanya

beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru.⁷

Pengalihan piutang (cessie) bertujuan untuk mendapatkan kreditor lainnya dalam pengajuan PKPU pernah terjadi pada PT. Global dan PT. Golden dalam perkara PKPU Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada perkara ini, PT. Global selaku pemohon PKPU/kreditor melakukan pengalihan sebagian dari piutangnya (cessie) kepada Johannes H.L. Thomas untuk memenuhi syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih karena PT. Global tidak mengetahui kreditor lain selain dirinya yang dimiliki oleh PT. Golden selaku termohon PKPU. Hakim dalam putusan ini mengabulkan permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya dan menganggap sah pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara.

Putusan perkara PKPU Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam putusannya hakim menimbang bahwa akta perjanjian pengalihan piutang (cessie) No. 4 tanggal 30 April 2012 yang ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada termohon tentang adanya pengalihan piutang tersebut, maka seyogyanya suatu pengalihan piutang tersebut harus dipandang telah terjadi secara sah yang merujuk kepada ketentuan Pasal 613 KUHPerdara.⁸

Putusan tersebut hakim juga menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada maka harus dipandang bahwa Johannes H.L. Thomas adalah benar berkedudukan sebagai kreditor lain dari termohon. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dan memberikan PKPU-Sementara kepada termohon berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan yang dapat disimpulkan bahwa terbukti

⁶ Kheriah, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Vol. III, No. 2, 2013, hlm. 1.

⁷ Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 101.

⁸ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

termohon memiliki utang kepada pemohon dan kreditor lain, dan fakta fakta itu lahir dari suatu pembuktian yang nyata dan sederhana.

Selain pernah terjadi pada PT. Global dan PT. Golden, pengalihan piutang (cessie) untuk menemukan kreditor lainnya juga pernah terjadi pada PT. Tunggul Ulung Makmur (PT. TUM) selaku pemohon pailit/kreditor dan PT. Bintang Setia Indah (PT. BSI) selaku termohon pailit/debitor dalam perkara Pailit Nomor 09/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. Agar dapat memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pailit sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU yaitu debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor, PT. TUM selaku pemohon pailit/kreditor mengalihkan 10% dari piutang yang dimilikinya masing-masing kepada Maswadi dan Yanto Ndey.

Putusan Perkara Nomor 09/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn, dalam putusannya hakim menimbang bahwa dalam peristiwa cessie dalam ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPedata ada seorang kreditor yang mengoperkan atau menyerahkan tagihan atas nama pemiliknya (terhadap debitornya) kepada pihak lain sehingga cessie merupakan salah satu bentuk penggantian kreditor yang artinya hak atas tagihan dialihkan seluruhnya dari cedent kepada cessionaris. Hakim juga menimbang bahwa pada prinsipnya cessie berarti penyerahan tagihan atas nama yang diatur dalam ketentuan Pasal 613 KUHPedata yang tercantum dalam Bagian Kedua, Bab Ketiga, Buku II KUHPedata tentang Cara Memperoleh Hak Milik yang merinci cara-cara memperoleh hak milik dimulai dari Pasal 584 s.d 613 KUHPedata. Salah satu cara untuk memperoleh hak milik sebagaimana Pasal 584 KUHPedata yang ada hubungannya dengan cessie adalah "...penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap benda tersebut".

Hakim menimbang dalam perkara ini, sehubungan dengan cessie tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPedata, untuk dapat beralihnya cessie harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Adanya penyerahan;
2. Di dasarkan atas suatu peristiwa perdata;
3. Penyerahan itu untuk memindahkan hak milik;
4. Dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas dengan benda itu.

Bedasarkan unsur tersebut, hakim berpendapat bahwa untuk terjadinya cessie harus diawali dengan adanya peristiwa perdata yang sah antara para pihak yang menyerahkan dengan yang menerima cessie tersebut karena pada Akta Cessie Nomor 335 dan Nomor 336, tanggal 20 Maret 2013 tersebut tidak ada satupun bukti suratnya yang dapat menjelaskan peristiwa perdata apa yang terjadi antara pemohon dengan Maswadi dan Yanto Ndey selaku cessionaris.

Berbeda dengan putusan PKPU No. 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana hakim mengakui bahwa telah terjadinya pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan PT. Global (pemohon PKPU) kepada Johannes H.L. Thomas meskipun pemohon hanya mengalihkan sebagian dan bukan seluruhnya piutang yang dimilikinya dan diantara kedua pihak juga tidak diawali peristiwa perdata terlebih dahulu sebelum terjadinya perjanjian cessie. Namun pada perkara pailit dalam putusan No. 09/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn, menolak permohonan pailit yang diajukan pemohon karena hakim berpendapat bahwa Cessie yang dilakukan oleh PT. TUM (pemohon pailit) kepada Maswadi dan Yanto Ndey dianggap tidak sah karena hakim menilai bahwa cessie dilakukan untuk mengalihkan seluruh piutang yang dalam arti hanya untuk penggantian kreditor saja bukan untuk penambahan kreditor.

Pendapat hakim yang berbeda ini tentu tidak memenuhi asas kepastian hukum karena akibat perbedaan pendapat antara para hakim mengakibatkan

perbedaan putusan yang diberikan hakim terhadap permasalahan yang sama. Ketentuan Pasal 613 KUHPerdara tersebut hanya mengatur cessie secara umum dalam hal pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya tetapi tidak ada pengaturan secara khusus mengenai pengalihan piutang yang dilakukan guna menimbulkan kreditor lainnya jika dalam permasalahan utang piutang, kreditor tidak mengetahui kreditor lainnya dari seorang debitor.

Permasalahan tersebut tentu menimbulkan permasalahan baru bagi para pihak yaitu kreditor dan debitor jika dalam hal untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU hanya terdapat 1 (satu) kreditor saja sedangkan syaratnya harus memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlunya pembaharuan terhadap UUK dan PKPU serta perlu ditambahkan pengaturan khusus mengenai cara menemukan kreditor lainnya jika debitor hanya memiliki 1 (satu) kreditor untuk memenuhi syarat harus adanya 2 (dua) kreditor atau lebih di dalam UUK dan PKPU. Pengaturan tersebut tentu akan menimbulkan suatu kepastian hukum dan memenuhi asas kepastian hukum, sehingga baik kreditor maupun debitor tidak mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang dari penegak hukum serta para pihak dan juga tidak dapat melakukan kecurangan serta tidak mendapatkan putusan yang berbeda terhadap permasalahan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hal ini menarik untuk diteliti dan dijadikan dalam bentuk Proposal yang berjudul: **“Analisis Yuridis Penggunaan Cessie Untuk Pengajuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan 1 (Satu) Kreditor (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn.)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dapat mengajukan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan 1 (satu) kreditor?
2. Bagaimana cara memperoleh kreditor lainnya dengan menggunakan lembaga dan sarana hukum yang tersedia dan berlaku di hukum Indonesia?
3. Apakah cessie memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan kreditor lainnya?

C. Pembahasan

a. Peranan Pengajuan Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan 1 (Satu) Kreditor.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dilihat dari pengertian kepailitan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang memiliki piutang kepada debitor.⁹

Selain permohonan pailit, cara menyelesaikan permasalahan utang piutang berdasarkan UUK dan PKPU ini adalah dengan permohonan penundaan kewajiban dan pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang (suspension of payment atau surseance van betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh

⁹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Cet. I, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hlm. 72.

undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya sehingga, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium (legal moratorium).¹⁰

Pasal 222 UUK PKPU dinyatakan mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan syarat dari pengajuan PKPU adalah sebagai berikut:

1. Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;
2. Debitor yang diperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;
3. Kreditor yang diperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan

kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

PT. Global dan PT. Golden dalam perkara PKPU Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada perkara ini, PT. Global selaku pemohon PKPU/kreditor melakukan pengalihan sebagian dari piutangnya (cessie) kepada Johannes H.L. Thomas untuk memenuhi syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih karena PT. Global tidak mengetahui kreditor lain selain dirinya yang dimiliki oleh PT. Golden selaku termohon PKPU. Hakim dalam putusan ini mengabulkan permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya dan menganggap sah pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara.

Putusan perkara PKPU Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam putusannya hakim menimbang bahwa akta perjanjian pengalihan piutang (cessie) No. 4 tanggal 30 April 2012 yang ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada termohon tentang adanya pengalihan piutang tersebut, maka seyogyanya suatu pengalihan piutang tersebut harus dipandang telah terjadi secara sah yang merujuk kepada ketentuan Pasal 613 KUHPerdara.¹¹

Putusan tersebut hakim juga menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada maka harus dipandang bahwa Johannes H.L. Thomas adalah benar

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175.

¹¹ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

berkedudukan sebagai kreditor lain dari termohon. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dan memberikan PKPU-Sementara kepada termohon berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan yang dapat disimpulkan bahwa terbukti termohon memiliki utang kepada pemohon dan kreditor lain, dan fakta fakta itu lahir dari suatu pembuktian yang nyata dan sederhana.

Selain pernah terjadi pada PT. Global dan PT. Golden, pengalihan piutang (cessie) untuk menemukan kreditor lainnya juga pernah terjadi pada PT.Tunggul Ulung Makmur (PT.TUM) selaku pemohon pailit/kreditor dan PT. Bintang Setia Indah (PT.BSI) selaku termohon pailit/debitor dalam perkara Pailit Nomor 09/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn. Putusan Perkara Nomor 09/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn, dalam putusannya hakim menimbang bahwa dalam peristiwa cessie dalam ketentuan Pasal 613 Ayat (1) KUHPedata ada seorang kreditor yang mengoperkan atau menyerahkan tagihan atas nama pemiliknya (terhadap debitornya) kepada pihak lain sehingga cessie merupakan salah satu bentuk penggantian kreditor yang artinya hak atas tagihan dialihkan seluruhnya dari cedent kepada cessionaris.

Hakim menimbang dalam perkara ini, sehubungan dengan cessie tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPedata, untuk dapat beralihnya cessie harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Adanya penyerahan;
2. Di dasarkan atas suatu peristiwa perdata;

3. Penyerahan itu untuk memindahkan hak milik;
4. Dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas dengan benda itu.

Hakim berpendapat bahwa perjanjian cessie yang terjadi antara pemohon pailit (PT.TUM) dengan Maswadi dan Yanto Ndey harus dianggap tidak pernah ada karena peristiwa perdatanya tidak ada dan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 613 ayat (1) dan Pasal 584 KUHPedata. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut maka hakim menolak permohonan pernyataan pailit pemohon karena Maswadi dan Yanto Ndey bukanlah merupakan kreditor lain dari termohon pailit (PT.BIS) dan pemohon pailit tidak dapat membuktikan termohon pailit memiliki dua atau lebih kreditor dan permohonan pailit tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan tersebut.

Pengajuan permohonan Pailit dan PKPU harus memenuhi syarat seperti yang terkandung dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Aturan ini sebagai aturan hukum tertulis yang menjadi pedoman bagi kreditor dalam mengajukan permohonan Pailit dan PKPU ke Pengadilan yang sifatnya pasti dan berlaku kepada seluruh pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan Pailit dan PKPU. Norma hukum yang tertulis ini yang menjadi kepastian hukum bagi para kreditor maupun debitor yang ingin mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan yang harus dipenuhi agar permohonan PKPU yang disampaikan ke Pengadilan akan diakui dan dikabulkan

PKPU Sementara kepada termohon PKPU tersebut.

Akibat dari tindakan debitur yang berhenti membayar utang kepada kreditornya, kreditor mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan Pailit dan PKPU ke Pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum terhadap seluruh piutangnya. Konsep kepailitan juga memuat syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan sesuai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan teori di atas peneliti berpendapat bahwa kreditor tidak dapat mengajukan permohonan Pailit dan PKPU dengan hanya 1 (satu) kreditor saja. Apabila kreditor ingin tetap mengajukan permohonan PKPU maka harus melakukan pengalihan piutang sebagian kepada pihak lain untuk mendapatkan kreditor lain sebagai syarat permohonan Pailit dan PKPU. Hal ini dikarenakan adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang mengatakan aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama yang telah diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata). Aturan hukum tertulis ini yang disebut dengan kepastian hukum, pasti karena ada payung hukum yang mengaturnya dan mengikat bagi seluruh pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan pailit dan PKPU. Kreditor mapun harus memperhatikan ketentuan ini dalam melakukan mengalihkan sebagian piutangnya untuk mendapatkan kreditor baru bagi debitornya.

Pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan PT. Global kepada Johannes H.L. Thomas yang bertujuan untuk mendapatkan kreditor lainnya guna memenuhi syarat pengajuan PKPU telah sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 613 KUH.Perdata. Pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan PT. TUM kepada Maswadi dan Yanto Ndey untuk mendapatkan kreditor baru untuk memenuhi syarat pengajuan Pailit juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata.

Berdasarkan ketentuan hukum tertulis Pasal 613 KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, pengalihan piutang tersebut harus dianggap sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan kreditor dapat memperoleh cara mendapatkan kreditor lainnya yang disebut dengan cessie untuk memenuhi syarat pengajuan permohonan Pailit dan PKPU seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Cara Memperoleh Kreditor Lainnya dengan Menggunakan Lembaga dan Sarana Hukum yang Tersedia.

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata). Walaupun demikian, kata cessie tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Cessie hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi.

Pasal 613 KUHPerdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdata adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitor mengetahui dengan pasti siapa kreditornya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud.

C. Cessie Memiliki Kekuatan Hukum untuk Mendapatkan Kreditor Lainnya.

Peralihan piutang yang disebut dengan cessie diatur dalam Buku II, Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan penyerahan kebendaan bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik maupun akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya, Pasal 613 ayat (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru mempunyai akibat hukum kepada debitor, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitor dan/atau debitor secara tertulis telah menyetujui atau mengakuinya.¹²

Syarat utama keabsahan cessie adalah pemberitahuan cessie tersebut kepada pihak terhutang yaitu debitor untuk disetujui dan diakuinya. Akta cessie biasanya dibuat dalam bentuk “assignment deed”.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang mengatakan bahwa aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Pasal 613 ayat (1) dan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata menyebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain dan penyerahan yang demikian bagi si

¹² Suharnoko dan Endah Hartati, *Op.cit*, hlm. 102.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Ketentuan ini hanya memiliki suatu kepastian hukum secara umum yang mana pengaturan pengalihan piutang ini bukanlah menjadi suatu cara yang khusus yang disarankan untuk digunakan untuk membantu para kreditor untuk mendapatkan kreditor lainnya jika kreditor tidak mengetahui kreditor lain yang dimiliki oleh debitor.

Hal ini juga dapat dikaitkan dengan konsep kepailitan yang mana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Permohonan Pailit dan PKPU harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Debitur siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).¹⁴

Pada perkara PKPU Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst antara PT. Global dan PT. Golden dimana PT. Global selaku pemohon PKPU/kreditor melakukan pengalihan sebagian dari piutangnya (*cessie*) kepada Johannes H.L. Thomas untuk memenuhi syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih karena PT. Global tidak mengetahui kreditor lain selain dirinya yang dimiliki oleh PT. Golden selaku termohon PKPU. Hakim dalam

putusan ini mengabulkan permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya dan menganggap sah pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara meskipun PT. Global hanya mengalihkan sebagian dari piutangnya saja bukan seluruhnya dan diantara PT. Global dengan Johannes H.L.Thomas tidak diawali peristiwa perdata terlebih dahulu sebelum terjadinya perjanjian *cessie*.

Hal ini berbeda dengan perkara pailit dalam putusan No. 09/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn antara PT. Tunggul Ulung Makmur (PT.TUM) selaku pemohon pailit/kreditor dan PT. Bintang Setia Indah (PT. BSI) selaku termohon pailit/debitur yang mana hakim menolak permohonan pailit yang diajukan pemohon karena hakim berpendapat bahwa *Cessie* yang dilakukan oleh PT.TUM (pemohon pailit) kepada Maswadi dan Yanto Ndey dianggap tidak sah karena hakim menilai bahwa *cessie* dilakukan untuk mengalihkan seluruh piutang yang dalam arti hanya untuk penggantian kreditor saja bukan untuk penambahan kreditor. Hakim juga berpendapat bahwa pemohon harus memiliki terlebih dahulu peristiwa perdata terhadap Maswadi dan Yanto Ndey sebelum dilakukannya perjanjian *cessie*.

Permasalahan tersebut tentu menimbulkan permasalahan baru bagi para pihak yaitu kreditor dan debitor jika dalam hal pengajuan permohonan pailit dan PKPU hanya terdapat 1 (satu) kreditor saja sedangkan syaratnya harus memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih. Hal ini tentu menghambat proses penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor serta menghambat kelangsungan usaha para pihak, dimana dalam berbisnis, uang

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 52.

merupakan modal paling penting untuk menjalankan usahanya, dan efisiensi waktu juga sangat diperlukan agar tidak mengganggu kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlunya pembaharuan terhadap UUK dan PKPU serta perlu ditambahkan pengaturan khusus secara rinci mengenai cara pengalihan piutang guna menemukan kreditor lainnya jika debitur hanya memiliki 1 (satu) kreditor dan kreditor juga tidak mengetahui kreditor lainnya yang dimiliki oleh debitur atau dengan kata lain debitur harus memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengaturan secara khusus tersebut tentu akan memiliki suatu kepastian hukum bagi kreditor maupun debitur yang ingin mengajukan permohonan pailit atau PKPU, sehingga baik kreditor maupun debitur tidak mendapatkan tindakan yang berbeda dalam memberikan keputusan ataupun ketetapan mengenai Kepailitan maupun permohonan PKPU dari penegak hukum.

D. Kesimpulan

1. Pengajuan Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan 1 (satu) Kreditor yang diajukan oleh PT. Global sebagai kreditor dari PT. Golden dan PT. TUM sebagai kreditor dari PT. BSI tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kreditor dalam

mengajukan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus memenuhi syarat yaitu pertama debitur siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor; kedua debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya; dan yang terakhir utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*). Apabila debitur tidak memiliki lebih dari 1 kreditor maka, permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan ke Pengadilan Niaga akan ditolak.

2. Cara memperoleh kreditor lainnya dengan menggunakan lembaga dan sarana hukum yang digunakan PT. Global kepada Johannes H.L. Thomas untuk menimbulkan kreditor baru adalah dengan cara *cessie* yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Hal ini juga diterapkan PT. TUM kepada Maswadi dan Yanto Ndey untuk mendapatkan kreditor baru. Peralihan piutang dengan cara *cessie* ini yang dapat digunakan oleh pihak kreditor untuk menimbulkan kreditor baru agar syarat Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terpenuhi dan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

3. Secara umum cessie memiliki kekuatan hukum tetapi untuk mendapatkan kreditor lainnya dengan tujuan untuk memenuhi syarat pengajuan permohonan pailit dan PKPU, cessie tidak memiliki kekuatan hukum. Pengalihan piutang dengan cara cessie hanya diatur pada Pasal 613 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan penyerahannya kebendaan tubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik maupun akta dibawah tangan. Peralihan piutang yang dilakukan kreditor juga harus diketahui secara tertulis oleh debitor. Ketentuan hukum ini hanya memiliki kepastian hukum secara umum tetapi jika cara cessie ini digunakan untuk menemukan kreditor baru guna memenuhi syarat pengajuan permohonan pailit dan PKPU maka cessie ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena akan timbul beberapa pendapat hakim yang berbeda-beda seperti pada studi kasus yang penulis teliti.

E. Saran

1. Kreditor atau debitor maupun pihak lain yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) wajib memenuhi syarat untuk pengajuan tersebut terlebih dahulu seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni bahwa debitor harus memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditor karena jika tidak terpenuhi maka permohonan tersebut akan ditolak.
2. Perlu diadakannya suatu sosialisasi atau memperkenalkan kepada masyarakat banyak mengenai lembaga dan sarana hukum apa saja yang tersedia dan berlaku di hukum Indonesia yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu mempermudah masyarakat terkhusus para pihak yang memiliki permasalahan utang piutang untuk dapat menyelesaikan dengan cepat permasalahan yang terjadi di antara mereka. Seperti bagaimana seharusnya cara untuk menemukan kreditor lainnya untuk memenuhi syarat permohonan pailit dan PKPU sesuai dengan aturan yang berlaku di hukum Indonesia.
3. Seharusnya pengaturan mengenai cara mendapatkan kreditor lainnya yaitu dengan cara melakukan pengalihan piutang (cessie) guna memenuhi syarat pengajuan pailit dan PKPU ini perlu ditambahkan di dalam UUK dan PKPU supaya kreditor yang tidak mengetahui kreditor lainnya yang dimiliki debitor dapat melakukan cessie yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk memenuhi syarat pengajuan pailit dan PKPU tersebut sehingga tidak terjadi putusan yang berbeda pada permasalahan yang sama karena adanya perbedaan pendapat para hakim dan pengaturan cessie yang berlaku saat ini masih sangat

umum dan menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amirudin, Zainal Askin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anisah, Siti, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Total Media, Jakarta.
- Fuady, Munir, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Harahap, M. Yahya, 1999, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Hartini, Rahayu, 2009, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Cet. I, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Jono, 2013, Hukum Kepailitan, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Komariah, 2010, Hukum Perdata, UMM Press, Malang.
- Makara, Moh. Taufik, 2009, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. II, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- M. Manullang, E.Fernando, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku Kompas, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man S, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung.
- Satrio, J, 1999, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, Cet. II, Alumni, Bandung.
- Satrio, J, 2007, Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan Kebendaan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Dr. Sentosa, 2006, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2008, Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
- Subhan, M. Hadi, 2009, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan), Cet. II, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Suharnoko dan Endah Hartati, 2008, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Kencana, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999, Cetakan XXIX, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran

Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4443.

3. Kamus
J.T.C. Simorangkir, et.al,
Kamus Hukum, Cet.IX, Sinar
Grafika, Jakarta, 2005.
Tim Penyusun Kamus Pusat
Bahasa, 2008, Kamus Bahasa
Indonesia, Departemen
Pendidikan Nasional, Jakarta.
4. Putusan
Putusan Pengadilan Niaga
Nomor:
09/Pailit/2013/PN.NIAGA.M
DN.
Putusan Pengadilan Niaga
Nomor:
63/PKPU/2012/PN.NIAGA.JK
T.PST.
5. Website
<http://www.unhalu.ac.id>,
diakses, tanggal, 11 Juni 2015
[http://www.jurnalhukum.com/
cessie/](http://www.jurnalhukum.com/cessie/), diakses, tanggal, 7 Juli
2017.
[http://docplayer.info/41356726
-07-11-2016-syarat-dalam-
cessie-pengalihan-hak-dalam-
kontrak-cessie-pengalihan-
kewajiban-delegasi-cessie](http://docplayer.info/41356726-07-11-2016-syarat-dalam-cessie-pengalihan-hak-dalam-kontrak-cessie-pengalihan-kewajiban-delegasi-cessie),
diakses, tanggal, 22 Agustus
2017.